

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM PENERTIBAN ORGANISASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT**

Nama Prabu Ksatria Wicaksono

NPP. 30.0573

Asdaf Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 30.0573@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Ondo Riyani, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Community organization is a form of community aspirations that was born because of the similarity of perceptions and opinions in the community itself. The communities share the same views and goals. But with the development of Community Organizations that appear in the social environment, there are elements of Community Organizations who have an understanding that is contrary to the foundation of the Indonesian state. This can be a trigger for violations caused by Community Organizations. Therefore, it is necessary to control directed by the Agency for National Unity and Politics. **Purpose:** To analyze the strategy and from the Agency for National Unity and Politics in conducting guidance and control over Community Organizations in West Bandung Regency. **Method:** the design used in the research is a descriptive qualitative research method. Data collected through interviews and documentation techniques. Meanwhile, in analyzing the data, the writer uses SWOT analysis. **Result:** The results of this study indicate that the communication and approaches taken between the National Unity and Politics Agency and Community Organizations are the main factors in the success of controlling Community Organizations in West Bandung Regency. However, there are still a number of weaknesses that lead to deficiencies in the process of controlling Ormas. With a small number of employees, the control process is a little slow and lacks time efficiency. As a result of the lack of Human Resources resulting in less than the maximum in the implementation of program activities for controlling Community Organizations in West Bandung Regency. But with its shortcomings, the West Bandung Regency Politics and National Unity Agency continues to carry out activities according to the program and maximize competent Human Resources. **Conclusion:** Based on the results of the research, the authors conclude that the West Bandung Regency Kesbangpol Agency has worked quite well, by minimizing the factors that cause violations, including differences in views, regional competition, and unfulfilled demands on the government.

Keywords: Community Organization, Controlling, Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Organisasi Masyarakat adalah bentuk bagi aspirasi masyarakat yang lahir karena adanya kesamaan persepsi dan pendapat pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu memiliki kesamaan dalam pandangan dan tujuan yang sama. Tetapi dengan seiring berkembangnya Organisasi Masyarakat yang muncul pada lingkungan kemasyarakatan, adanya

oknum dari Organisasi Masyarakat yang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia. Hal ini dapat menjadi pemicu pelanggaran yang diakibatkan oleh Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penertiban yang terarah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. **Tujuan:** Menganalisis strategi dan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. **Metode:** desain yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis SWOT. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi dan pendekatan yang dilakukan antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi Masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan kegiatan penertiban Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Namun masih didapati beberapa kelemahan yang menjadikan kekurangan dalam proses penertiban Ormas. Dengan jumlah pegawai yang sedikit proses penertiban sedikit berjalan lambat dan kurang efisiensi waktu. Akibat minimnya Sumber Daya Manusia berakibat kurang maksimal dalam pelaksanaan program kegiatan penertiban Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi dengan kekurangan yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tetap melaksanakan kegiatan sesuai program dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. **Kesimpulan:** Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat telah bekerja dengan cukup baik, dengan meminimalisir faktor penyebab terjadinya pelanggaran diantaranya yaitu perbedaan pandangan, persaingan wilayah, dan tuntutan kepada pemerintah yang tidak terpenuhi.

Kata kunci: Organisasi Masyarakat, Penertiban, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan sikap demokrasi. Dengan adanya kebebasan berdemokrasi berarti rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Kebebasan berorganisasi yang dimaksud ialah hak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung kedalam sebuah organisasi tanpa ada larangan dari siapapun. Pada hakikatnya organisasi masyarakat dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dengan berlandaskan untuk membantu pemerintah dalam membangun kesadaran bangsa yang berasaskan Pancasila. Banyaknya organisasi masyarakat yang dibentuk karena adanya persamaan pandangan dan pendapat, mengakibatkan adanya organisasi masyarakat yang menyimpang dari Pancasila sebagai ideologi negara dimana sila ketiga dari Pancasila berbunyi "Persatuan Indonesia".

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melangsungkan sosialisasi kepada Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sosialisasi yang dilakukan berupa pembinaan. Namun pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tidak sepenuhnya relevan. Masih banyaknya masalah yang timbul akibat oknum-oknum dari Organisasi Masyarakat yang membuat resah warga Kabupaten Bandung Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan pada penelitian ini berupa kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah adanya pergesekan antara dua Organisasi Masyarakat yaitu Pemuda Pancasila dan Matel (Mata Elang) sehingga terjadi penganiayaan dan pencurian motor yang dilakukan oleh oknum dari Organisasi Masyarakat Matel (Mata Elang) kepada Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang menyebabkan seorang anak dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang ditampar kemudian di rampas kendaraannya berupa sepeda motor. Kasus selanjutnya yaitu, adanya penganiayaan dua pegawai Pemda Kabupaten Bandung Barat oleh oknum Organisasi Masyarakat dan akibat memaksa meminta Tunjangan Hari Raya (THR). Oleh karena itu diperlukan strategi dalam penertiban organisasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian. Penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yaitu, Jurnal Satria (2018) dengan judul “Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik” penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penertiban organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Penelitian oleh Efyanti (2019) yang berjudul “Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat”. Yang berfokus pada peran Kesbangpol Linmas Kota Sungai Penuh dalam menjaga kestabilan politik dibidang sosial politik. Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Konflik Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rempug di Jakarta 2016-2018. Penelitian Atmika dkk. (2018) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Konflik antara Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug di Jakarta Tahun 2016-2018” yang mengkaji tentang peran Pemprov DKI Jakarta dalam penyelesaian konflik antara organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rempug. Penelitian Maasum (2018) yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Organisasi Masyarakat yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan” yang berfokus pada reaksi masyarakat terhadap hukum yang diterapkan yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perbedaan pada lokus penelitian dimana penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, selain itu perbedaan lainnya terletak pada metode yang digunakan oleh penulis. Penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi menurut Quinn.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

II. METODE

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam melakukan setiap penelitian untuk menghasilkan produk penelitian yang baik, sehingga penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Quinn (1999: 10) mengungkapkan bahwa strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Strategi disusun menggunakan teknik Analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O), Ancaman (T).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian dengan merujuk pada teori yang digunakan yaitu teori Strategi menurut Quinn (1999: 10) dengan teknik analisis SWOT yang terdiri dari aspek *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kekurangan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman). Dengan adanya dimensi diatas, diharapkan peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu Bagaimanakah strategi yang dilakukan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan penertiban terhadap organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dan apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan ketertiban yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat

3.1. Strength (S)

3.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Penulis mendapati kesimpulan bahwa pegawai yang ada di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat sesungguhnya menjadi kekuatan mereka dalam proses penyelenggaraan kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan Renstra Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Kekuatan yang dimiliki ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat menutupi kekurangan pegawai yang dialami

3.1.2 Program

Pelaksanaan program yang diberlakukan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat disesuaikan dengan Renstra yang dibentuk tahun 2018-2023 di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan program-program yang akan dilakukan dalam 5 tahun kedepan. penulis dapat menyimpulkan bahwa program yang dimiliki oleh Bakesbangpol Kabupaten Bandung Barat sesungguhnya telah berjalan dengan baik, dari beberapa program yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Bandung Barat menjadi kekuatan dalam penegakkan penertiban Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Dapat ditinjau dari minimnya permasalahan dan kasus yang terjadi di wilayah sekitaran Kabupaten Bandung Barat.

3.2. Weakness (W)

3.2.1 Keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia yang artinya minimnya jumlah pegawai yang tersedia juga menjadi kelemahan utama dalam proses penegakkan penertiban Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, sehingga masih banyak Organisasi Masyarakat yang menekan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengapa proses validasi dari program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat kurang cepat.

Penulis mendapati bahwa kekurangan yang ada di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dalam segi kelemahan yang dimiliki yakni kekurangan dalam jumlah pegawai tersebut, dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan kinerja pegawai yang ada. Dan berdasarkan wawancara tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat berhasil memaksimalkan kelemahan yang mereka miliki menjadi kekuatan dalam efektivitas kinerja pegawai.

3.2.2 Kurang Maksimal dalam Pelaksanaan Program

Penyusunan program sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 sepenuhnya kurang berjalan sesuai dengan harapan. Program tetap berjalan namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kekurangan pegawai berdampak kepada kurang maksimalnya dalam pelaksanaan program yang ada. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena balik kepada kekurangan dalam jumlah pegawai. Tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tetap bersikeras memaksimalkan kekurangan yang mereka miliki.

3.2.3 Anggaran

Dalam kegiatan penertiban Organisasi Masyarakat yang dilakukan Oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat membutuhkan anggaran yang sesuai. Pada dasarnya, sudah dianggarkan melalui Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat yang memuat dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penulis menemukan fakta bahwa kekurangan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam penegakkan penertiban Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Karena jika tidak ada anggaran wajarnya kegiatan tidak akan berjalan. Tetapi dengan kemurahan hati yang dimiliki oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat dengan secara sukarela menggelar kegiatan dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa menggunakan anggaran.

3.3. Opportunity (O)

3.3.1 Adanya organisasi Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dengan peristiwa kemunculan Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki artian yang berbeda. Kemunculan Organisasi masyarakat ini bisa saja menjadi dampak yang positif apabila dapat diberdayakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dengan baik, namun bisa saja menjadi dampak yang negatif jika tidak diperhatikan.

3.3.2 Kebutuhan Ketertiban Bagi Masyarakat

Didasari dengan peristiwa berdirinya suatu Organisasi Masyarakat, maka dampak yang dihasilkannya berupa dorongan dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk diadakan penertiban kepada Organisasi Masyarakat tersebut. Tuntutan dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan penertiban supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi masyarakat, seperti kericuhan antar Organisasi Masyarakat, kegiatan yang tidak jelas arahnya kemana, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kerukunan dan kekondusifan yang sudah ada.

3.4. Threats (T)

3.4.1 Keberagaman Ormas yang dibentuk oleh Masyarakat

Penulis mendapati kesimpulan bahwa ormas itu jenisnya beragam. Berdasar kepada keberagaman ormas tersebut dikhawatirkan dapat menjadi ancaman kepada keselamatan warga Kabupaten Bandung Barat. Tetapi salah satu ormas yang telah diwawancarai tersebut menyampaikan bahwa Organisasi BRIGEZ ini bukan ancaman yang harus dikhawatirkan oleh warga Kabupaten Bandung Barat. Karena organisasi ini mengklaim bahwa tujuan mereka sebenarnya hanya untuk bersosialisasi dan berorganisasi tidak lebih. Bahkan harapan mereka untuk lebih dekat kepada rakyat dan hidup berdampingan bersama warga Kabupaten Bandung Barat.

3.4.2 Berita Hoax

Berita hoax dapat menjadi ancaman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta masyarakat Kabupaten Bandung Barat dikarenakan berita-berita yang tidak jelas sumbernya dapat memicu

kesalahpahaman bagi yang menerima berita tersebut, selanjutnya dikhawatirkan kepada masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah yang sebetulnya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan penegakkan penertiban Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tersebut.

3.4.3 Perselisihan Antar Organisasi Masyarakat

Penulis mendapati bahwa sebetulnya yang menjadi permasalahan didalam perselisihan antar Organisasi Masyarakat ialah adanya perbedaan dalam sudut pandang yang dimiliki oleh masing-masing organisasi masyarakat atau individu dari setiap anggota organisasi masyarakat, adanya perebutan wilayah kekuasaan sebagai tempat dari suatu Organisasi Masyarakat dipergunakan untuk berkumpul, dan adanya ketidaksukaan dari masing-masing individu anggota atau pengurus dari suatu Organisasi Masyarakat kepada Organisasi Masyarakat lainnya. Hal ini yang mendasari sebagai alasan terjadinya perselisihan yang terjadi antara masing-masing organisasi masyarakat. Selain itu, efek yang diterima oleh warga sekitar atas kejadian perselisihan antar organisasi masyarakat ini dinilai meresahkan warga sekitar. Adanya keluhan yang disampaikan warga asli Kabupaten Bandung Barat yang merasakan dampak tersebut. Harapannya, pemerintah dapat mengurangi konflik yang ada terhadap permasalahan sengketa perselisihan antar Organisasi Masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Setiap Organisasi Masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Kelompok Masyarakat atau Organisasi Masyarakat dilarang melakukan kegiatan yang dianggap radikal yang mengancam kedaulatan NKRI, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal penting lainnya juga disampaikan bahwa Organisasi Masyarakat atau Kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang dari penegak hukum. Bagi Organisasi Masyarakat yang melanggar hal-hal tersebut, dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi peringatan atau tertulis, pemberhentian bantuan atau hibah, pencabutan surat keterangan atau status.

Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu, adanya perbedaan pandangan yang memicu perselisihan dimana seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan bersosialisasi ialah kesamaan dalam pola pikir dan mengesampingkan hal-hal yang bersifat menyakiti atau merendahkan, kesadaran bahwa interaksi perilaku dapat mengakibatkan masalah. Kemudian adanya persaingan wilayah kekuasaan memiliki dampak yang buruk, karena kebiasaan yang mereka terapkan selanjutnya bisa menjadi konflik dengan berusaha memperebutkan wilayah kekuasaan Organisasi Masyarakat lainnya, sehingga terjadi keributan dan meresahkan warga sekitar. Hal seperti ini yang dapat merugikan kedua pihak jika sampai ada tindakan kekerasan yang memakan korban jiwa. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian wilayah kekuasaan yang adil sehingga tidak terjadi perselisihan.

4.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan fakta bahwa Perlunya peningkatan dalam kegiatan bersosialisasi yang merupakan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Bandung Barat sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran. Dan meningkat komunikasi dengan instansi vertikal seperti Forkopimda Kabupaten Bandung Barat agar tidak terjadi kesalah pahaman atau miskomunikasi.

IV. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan Penertiban terhadap Organisasi Masyarakat sepenuhnya telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi dan pendekatan

yang dilakukan antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi Masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan kegiatan penertiban Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Namun masih didapati beberapa kelemahan yang menjadikan kekurangan dalam proses penertiban Ormas. Dengan jumlah pegawai yang sedikit proses penertiban sedikit berjalan lambat dan kurang efisiensi waktu. Akibat minimnya Sumber Daya Manusia berakibat kurang maksimal dalam pelaksanaan program kegiatan penertiban Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi dengan kekurangan yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat tetap melaksanakan kegiatan sesuai program dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Sehingga observasi yang dapat dilakukan oleh peneliti hanya dilakukan selama 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dipanjatkan atas kehadiat Allah SWT atas limpahan kasih sayang-Nya. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan oleh kedua orang tua peneliti tercinta Bapak Nana Darmana dan Ibu Emi Yustini. Peneliti juga berterimakasih kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penelitian untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Atmika, I. G. A., Madjid, M. A., & Malik, I. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Konflik antara Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug di Jakarta Tahun 2016-2018*. Universitas Pertahanan: Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 6(01), 53-78

Efyanti, Y. (2019). *Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan*. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18(02),65-79.

Maasum, M. (2018). *Penerapan Sanksi Terhadap Ormas Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lex Crimen, 6(05), 5-12.

Quinn. (1999). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. Massachusetts:Addison Wesley.

Satria, I. (2018). *Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Negeri Lampung